

PERSEPSI PUBLIK TERHADAP RENCANA KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA

Oleh: Rahmat Hidayat¹, Mardiana²

^{1,2}, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sembilanbelas November

Abstrak

Persepsi masyarakat terkait kebijakan pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi kajian utama dalam penelitian ini. Pemindahan ibu kota negara yang bertahun-tahun menjadi polemik akhirnya berujung pada keputusan presiden Jokowi yang menetapkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara baru Republik Indonesia menjadi fenomena menarik yang menjadi landasan penelitian ini dilaksanakan. Pendekatan explanatory dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara, terkait kebijakan publik yaitu pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Survey penelitian dilakukan pada 104 orang sampel dari 159.386 jiwa populasi Penajam Paser Utara. Hasil penelitian menemukan bahwa 67,31% tingkat pengetahuan masyarakat tentang rencana pemindahan ibukota negara, 51,92%, tingkat pengetahuan terkait alasan pemindahan, 42,31%, tingkat pengetahuan terkait dampak pemindahan ibu kota, dan 57,69% masyarakat menyatakan setuju/menerima pemindahan ibu kota. Secara umum masyarakat di Penajam Paser Utara menyuarakan persentasinya dalam bentuk persetujuan atas kebijakan pemindahan ibu kota negara dan menerima segala dampak dan alasan pemindahan yang sebelumnya telah mereka ketahui melalui berbagai sumber informasi baik langsung ataupun media massa.

Kata Kunci: Kebijakan Publik; Persepsi

PENDAHULUAN

Akhir periode pertama pemerintahan Jokowi tahun 2019 mengeluarkan keputusan yang sangat kontroversial yaitu pemindahan ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Menurut presiden Jokowi keputusan pemindahan ibu kota Negara sudah melalui proses kajian yang mendalam. Jokowi menyampaikan dalam Konferensi Pers di Istana Negara pada 26 Agustus 2019 bahwa Pemerintah telah melakukan studi yang mendalam. Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur” (CNBC Indonesia, 2019)

Pemilihan lokasi pemindahan ibu kota negara Indonesia ini adalah hasil kajian pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi pada konferensi pers tanggal 26 Agustus di Istana Negara, yakni daerah Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara dianggap oleh pemerintah sebagai daerah yang tidak memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, lokasi yang strategis karena berdekatan dengan kota yang telah berkembang, tersedianya infrastruktur yang relatif lengkap dan adanya lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 Hektar. Selain itu, pemindahan ibu kota juga bertujuan agar

pembangunan dapat merata. Pada tahun 2018 data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Pulau Jawa menyumbang 58,48 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sedangkan wilayah timur Indonesia, yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua hanya menyumbang 16,8 persen PDB. Kondisi ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata (Perencanaan Nasional & Bappenas, 2019).

Pemindahan ibu kota negara Indonesia menjadi suatu kebijakan publik yang diambil pemerintah sebagai upaya pemecahan masalah, mengurangi atau mencegah keburukan yang lebih fatal terkait kondisi ibu kota negara saat ini. Menurut Sahya Anggara (2014:24) Kebijakan publik dibedakan menjadi analisis kebijakan, kebijakan publik, dan anjuran kebijakan. Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Hal ini sesuai dengan konsep kebijakan yang dikemukakan oleh syafie bahwa kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, yang merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Seperti hasil studi yang dilakukan Nicodemus (2018) di Palangkaraya, meskipun pemerintah daerah Kalteng sudah menyatakan kesiapannya, namun banyak faktor yang perlu untuk diperhatikan, terutama aspek sosial, politik, birokrasi, dan daya dukung lingkungan hidup. Sehingga perlu dilakukan kajian mendalam terkait dengan perencanaan tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Pemindahan ibu kota negara menjadi suatu bentuk implementasi kebijakan publik pemerintah pusat yang bersifat *top down*, implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:195). Dalam hal ini pemerintah pusat selaku pengambil keputusan terkait kebijakan pemindahan ibu kota, yang mana kebijakan ini secara langsung dan tidak langsung akan berdampak pada seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah pusat atau daerah, pihak swasta maupun masyarakat, terkhusus masyarakat Penajam Paser Utara. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menelisik ataupun meneliti persepsi masyarakat di Penajam Paser Utara terkait pemindahan ibu kota yang secara langsung akan berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat disana dimasa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga Penajam Paser Utara dan penentuan sampel menggunakan teknik acak sederhana (*simple random sampling*).

Instrumen yang dipergunakan berupa angket atau kuisioner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Setiap variabel yang ada akan diberikan penjelasan, selanjutnya menentukan indikator yang akan diukur, hingga menjadi item pernyataan, seperti terlihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Variabel yang diukur

No.	Indikator	No.Item
1	Penyerapan Terhadap Rangsangan (Menyerap)	1,2
2.	Pengertian atau Pemahaman Masyarakat	3,4,5
3.	Menilai atau Evaluasi	6,7,8

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Prosedur pengolahan data setelah dilakukan pengumpulan data yaitu pengolahan data yang meliputi pengkodean data, tabulasi dan uji deskripsi.

PEMBAHASAN

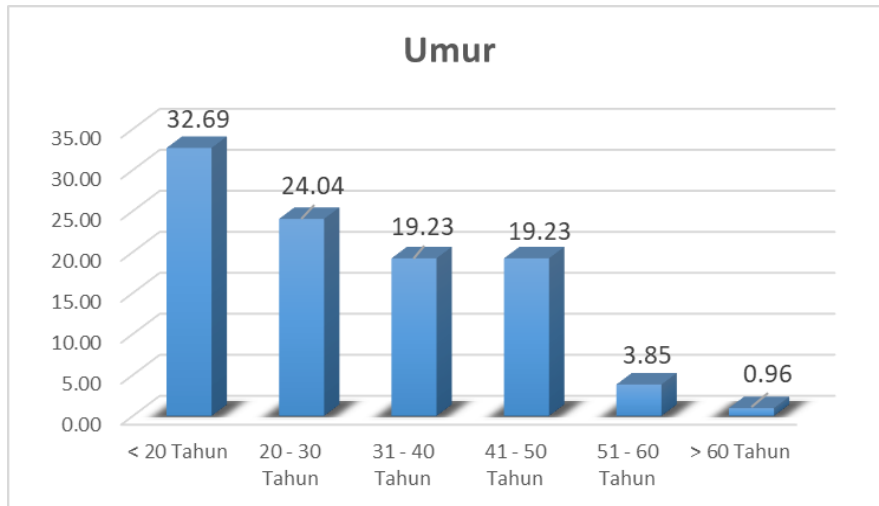
A. Gambaran Umum

1. Umur

Tabel 2. Persentase responden berdasarkan umur

Umur	Frekuensi	Persent
< 20 Tahun	34	32.69
20 - 30 Tahun	25	24.04
31 - 40 Tahun	20	19.23
41 - 50 Tahun	20	19.23
51 - 60 Tahun	4	3.85
> 60 Tahun	1	0.96

Berdasarkan Tabel 2 diatas, persentase responden yang tertinggi adalah responden yang berumur <20 tahun yaitu sebesar 32,69%. Dengan kata lain, secara umum masyarakat di Penajam Paser Utara responden yang terpilih dalam penelitian adalah responden yang berumur <20 tahun. Berikut tampilan grafiknya:



Gambar 1. Grafik persentase responden berdasarkan umur

2. Jenis Kelamin

Tabel 3. Persentase responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persent
Laki - laki	52	50.00
Perempuan	52	50.00

Berdasarkan Tabel 3 diatas, persentase responden laki-laki dan perempuan sama. Dengan kata lain, secara umum masyarakat di Penajam Paser Utara responden yang terpilih dalam penelitian untuk jenis kelamin terdistribusi secara merata. Berikut tampilan grafiknya:



Gambar 2. Grafik persentase responden berdasarkan jenis kelamin

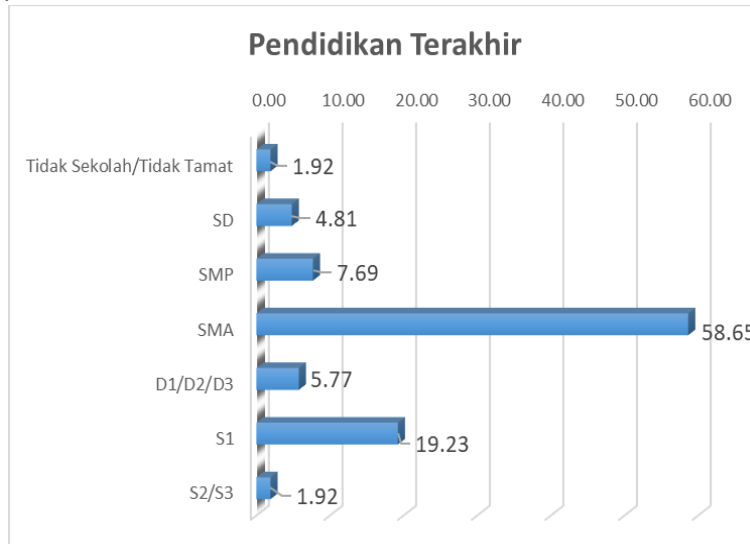
3. Pendidikan

Tabel 4. Persentase responden berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan terakhir	Frekuensi	Persent
Tidak Sekolah/Tidak Tamat	2	1.92
SD	5	4.81
SMP	8	7.69
SMA	61	58.65
D1/D2/D3	6	5.77

S1	20	19.23
S2/S3	2	1.92

Berdasarkan Tabel 4 diatas, persentase responden yang tertinggi adalah responden mempunyai Pendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 58,65%. Dengan kata lain, secara umum masyarakat di Penajam Paser Utara responden yang terpilih dalam penelitian adalah responden yang berpendidikan terakhir SMA. Berikut tampilan grafiknya:



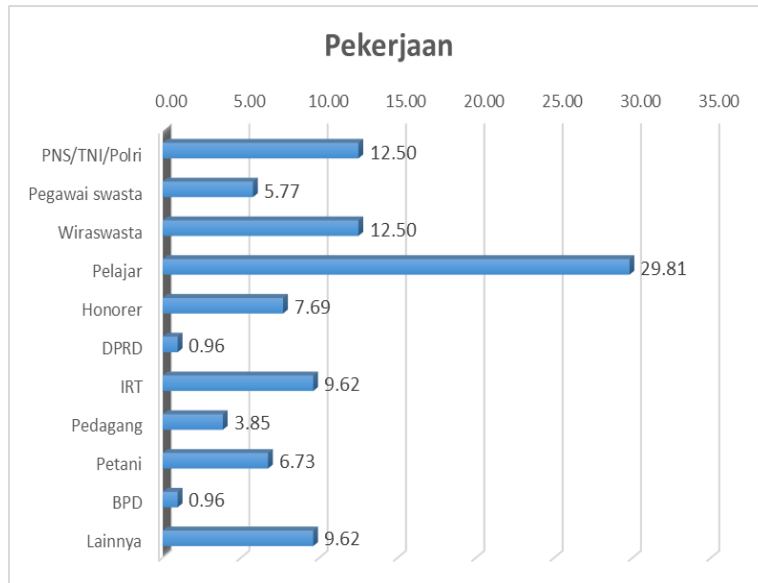
Gambar 3. Grafik persentase responden berdasarkan tingkat pendidikan

4. Pekerjaan

Tabel 5. Persentase responden berdasarkan jenis pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Persen t
PNS/TNI/Polri	13	12.50
Pegawai swasta	6	5.77
Wiraswasta	13	12.50
Pelajar	31	29.81
Honorer	8	7.69
DPRD	1	0.96
IRT	10	9.62
Pedagang	4	3.85
Petani	7	6.73
BPD	1	0.96
Lainnya	10	9.62

Berdasarkan Tabel 5 diatas, persentase responden yang tertinggi adalah responden mempunyai Pekerjaan sebagai pelajar yaitu sebesar 29,81%. Dengan kata lain, secara umum masyarakat di Penajam Paser Utara responden yang terpilih dalam penelitian adalah responden yang mempunyai pekerjaan atau status sebagai pelajar. Berikut tampilan grafiknya:



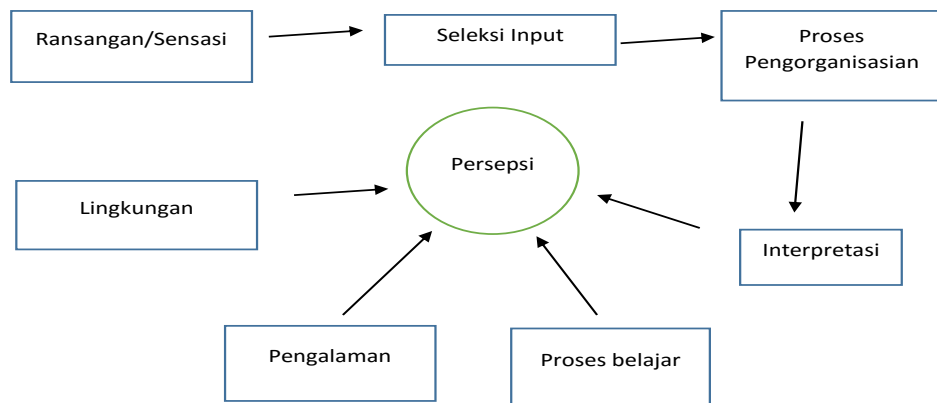
Gambar 4. Grafik persentase responden berdasarkan jenis pekerjaan

B. Persepsi Publik Terhadap Rencana Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia.

Setiap individu atau publik dalam kehidupan sehari-hari akan menerima *stimulus* atau rangsang berupa informasi, peristiwa, objek, kebijakan dan lainnya yang berasal dari lingkungan sekitar, stimulus atau rangsang tersebut akan dimaknai oleh individu, sebagai suatu proses dinamakan persepsi. Damayanti (2000) dalam prasilika, Tiara H. (2007 : 12-3) proses persepsi terbentuk melalui mekanisme seperti penyerapan terhadap rangsangan sebagai proses *input* dalam diri individu. Kemudian proses pengorganisasian informasi-informasi yang diterima melalui mekanisme sebelumnya. Terakhir mekanisme pemberian interpretasi sebagai fungsi *output*, proses ini individu memberikan penilaian dan evaluasi terhadap objek dengan dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pengalaman individu.

Persepsi publik akan berdampak terhadap proses penetapan suatu kebijakan publik, yang secara dua sisi dapat menjadi tuntutan ataupun dukungan terhadap suatu rencana kebijakan yang akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan sebelum ditetapkan suatu kebijakan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan konsep sistem kebijakan yang di kemukakan oleh David Easton dalam Maksudi (2015).

skema pembentukan persepsi pada skema di bawah ini :



Skema Pembentukan Persepsi

Penelitian ini melihat persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara melalui tiga tahapan yaitu penyerapan terhadap rangsangan informasi rencana pemindahan ibu kota negara, pengertian atau pemahaman masyarakat terkait rencana pemindahan ibu kota dan menilai serta mengevaluasi rencana pemindahan ibu kota negara.

a) Penyerapan Terhadap Rangsangan (Menyerap)

Penyerapan terhadap rangsangan adalah proses input dalam diri individu dengan mengetahui kebijakan pemindahan ibu kota negara yang dilihat dari tingkat pengetahuan masyarakat terhadap rencana pemindahan ibu kota dan sumber informasi pengetahuan masyarakat.

1. Pengetahuan Rencana Pemindahan Ibukota Negara

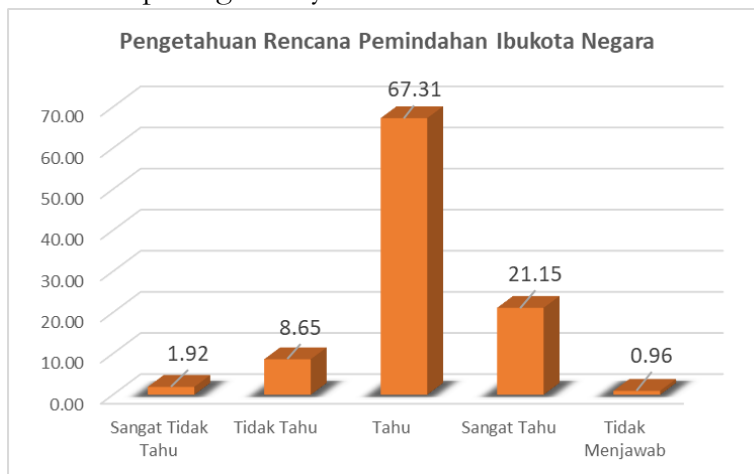
Tabel 6. Persentase pengetahuan responden tentang rencana pemindahan ibukota negara

Indeks Pengukuran	Frekuensi	Persent
Sangat Tidak Tahu	2	1.92
Tidak Tahu	9	8.65
Tahu	70	67.31
Sangat Tahu	22	21.15
Tidak Menjawab	1	0.96

Berdasarkan Tabel 6 diatas, persentase pengetahuan rencana pemindahan ibukota negara, sangat tidak tahu sebesar 1,92%, tidak tahu sebesar 8,65%, tahu sebesar 67,31%, sangat tahu sebesar 21,15%, dan tidak menjawab sebesar 0,96%. Artinya persentase responden mengatakan tahu lebih tinggi

dibanding dengan yang lain. Dengan kata lain, secara umum masyarakat di Penajam Paser Utara mengetahui tentang rencana pemindahan ibukota negara. Hal ini tak lepas dari aktifnya sosialisasi kebijakan terkait pemindahan ibu kota melalui berbagai media. Seperti yang dikemukakan oleh Widodo bahwa informasi penting untuk dikomunikasikan agar apa yang menjadi tujuan, isi, arah dan kelompok sasaran dari suatu kebijakan yang dibuat dapat tercapai. Dalam prosesnya, komunikasi memerlukan suatu media penghubung agar komunikator dalam hal ini, pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan dapat menyampaikan pesan kepada komunikannya atau masyarakat (Tine & Rohanda, 2017). Pada prinsipnya segala aktivitas sosialisasi pemerintah melalui media massa merupakan suatu upaya menciptakan kesamaan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah terkait urgensi pemindahan ibu kota negara Indonesia, tingginya tingkat pengetahuan responden menunjukkan suatu pembentukan persepsi yang diawali dari stimulasi, seleksi dan interpretasi telah sukses dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara kebijakan publik di Indonesia (Mulaya, 2008).

Berikut tampilan grafiknya:



Gambar 5. Grafik persentase pengetahuan responden tentang rencana pemindahan ibu kota negara

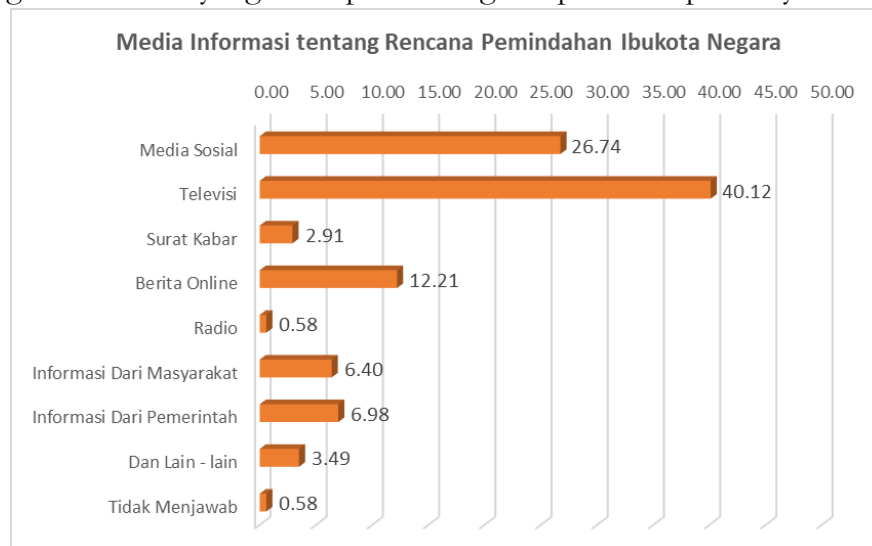
2. Media Informasi tentang Rencana Pemindahan Ibukota Negara

Tabel 7. Persentase media informasi responden tentang rencana pemindahan ibukota negara

Indeks Pengukuran	Frekuensi	Persent
Media Sosial	46	26.74
Televisi	69	40.12
Surat Kabar	5	2.91
Berita Online	21	12.21
Radio	1	0.58
Informasi Dari Masyarakat	11	6.40

Informasi Dari Pemerintah	12	6.98
Dan lain - lain	6	3.49
Tidak Menjawab	1	0.58

Berdasarkan Tabel 7 diatas, persentase media informasi tentang pemindahan ibukota negara melalui media sosial sebesar 26,74%, televisi sebesar 40,12%, surat kabar sebesar 2,91%, Berita Online sebesar 12,21%, radio sebesar 0,58%, informasi dari masyarakat sebesar 6,40%, informasi dari pemerintah sebesar 6,98%, dan lain-lain sebesar 3,49%, dan tidak menjawab sebesar 0,58%. Pada keterangan dan lain-lain responden mendapatkan informasi karena kedatangan presiden di Penajam Paser Utara. Persentase responden mendapatkan informasi melalui televisi lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Dengan kata lain, secara umum masyarakat di Penajam Paser Utara mengetahui atau mendapatkan informasi tentang rencana pemindahan ibukota negara melalui media televisi. Warto, Riyanto dan Prasasti dalam Ferry (2014) menyebutkan bahwa media televisi cukup berperan penting dalam sosialisasi nilai, terutama gambar visual yang ditampilkan sangat cepat diserap khalayak.



Gambar 6. Grafik persentase media informasi responden tentang rencana pemindahan ibukota Negara

b) Pengertian atau Pemahaman Masyarakat.

Pemberian pengertian dan pemahaman masyarakat merupakan proses pengorganisasian informasi-informasi yang diterima melalui mekanisme input. Pengertian atau pemahaman masyarakat dilihat dari tingkat pengetahuan masyarakat dipilihnya Penajam Paser Utara menjadi ibukota negara, tingkat pengetahuan masyarakat mengetahui alasan pemerintah memilih Penajam Paser Utara dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap dampak pemindahan ibukota negara.

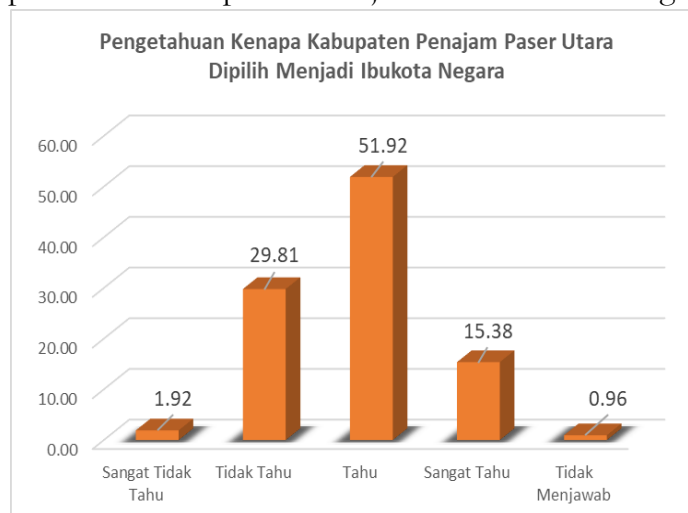
1. Pengetahuan Kenapa Kabupaten Penajam Paser Utara Dipilih Menjadi Ibukota Negara

Tabel 8. Persentase pengetahuan responden terkait pemilihan Kabupaten Penajam Paser Utara dipilih menjadi ibukota negara

Pengetahuan	Frekuensi	Persent
Sangat Tidak Tahu	2	1.92
Tidak Tahu	31	29.81
Tahu	54	51.92
Sangat Tahu	16	15.38
Tidak Menjawab	1	0.96

Berdasarkan Tabel 8 diatas, persentase pengetahuan kenapa kabupaten Penajam Paser Utara dipilih menjadi ibukota negara, sangat tidak tahu sebesar 1,92%, tidak tahu sebesar 29,81%, tahu sebesar 51,92%, sangat tahu sebesar 15,38%, dan tidak menjawab sebesar 0,96%. Artinya persentase responden mengatakan tahu lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Dengan kata lain, secara umum masyarakat di Penajam Paser Utara mengetahui tentang kenapa Penajam Paser Utara dipilih menjadi ibukota negara. Seperti yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2019 dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan bahwa pemilihan Kabupaten Penajam Paser Utara dipilih menjadi ibukota negarakarena *pertama*, risiko bencana minimal, *kedua* lokasinya strategis, *ketiga* dekat dengan wilayah kota yang berkembang, *keempat* infrastruktur lengkap, dan *kelima* telah tersedia lahan pemerintah (Liputan 6, 2019).

Berikut tampilan grafiknya terkait pengetahuan masyarakat terkait alasan pemilihan Kabupaten Panajam Paser Utara sebagai ibukota Negara:



Gambar 7. Grafik persentase pengetahuan responden terkait pemilihan Kabupaten Penajam Paser Utara dipilih menjadi ibukota Negara

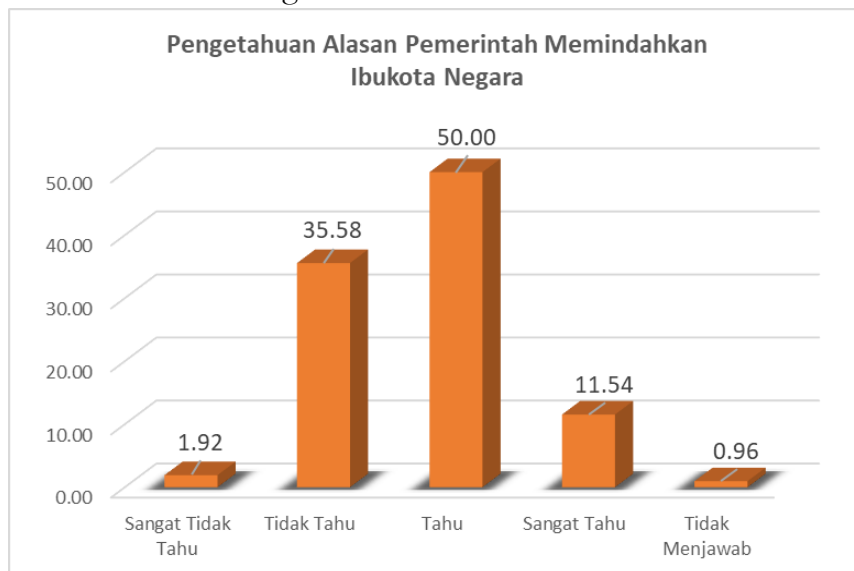
2. Pengetahuan Alasan Pemerintah Memindahkan Ibukota Negara

Tabel 9. Persentase pengetahuan responden tentang alasan pemerintah memindahkan ibukota negara

Indeks Pengukuran	Frekuensi	Persent
Sangat Tidak Tahu	2	1.92
Tidak Tahu	37	35.58
Tahu	52	50.00
Sangat Tahu	12	11.54
Tidak Menjawab	1	0.96

Berdasarkan Tabel 9 diatas, persentase pengetahuan alasan pemerintah memindahkan ibukota negara, sangat tidak tahu sebesar 1,92%, tidak tahu sebesar 35,58%, tahu sebesar 50,00%, sangat tahu sebesar 11,54%, dan tidak menjawab sebesar 0,96%. Artinya persentase responden mengatakan tahu lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Dengan kata lain, secara umum masyarakat di Penajam Paser Utara mengetahui tentang alasan pemerintah memindahkan ibukota negara. Dalam jumpa pers, Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan pemindahan ibukota yaitu terjadinya kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa terus meningkat meskipun telah dilakukan otonomi daerah. Selain itu kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, polusi udara dan air juga menjadi alasan pemindahan ibukota keluar Jawa.

Berikut tampilan grafik terkait tingkat pengetahuan masyarakat tentang alasan pemindahan ibukota Negara:



Gambar 8. Grafik Persentase pengetahuan responden tentang alasan pemerintah memindahkan ibukota Negara

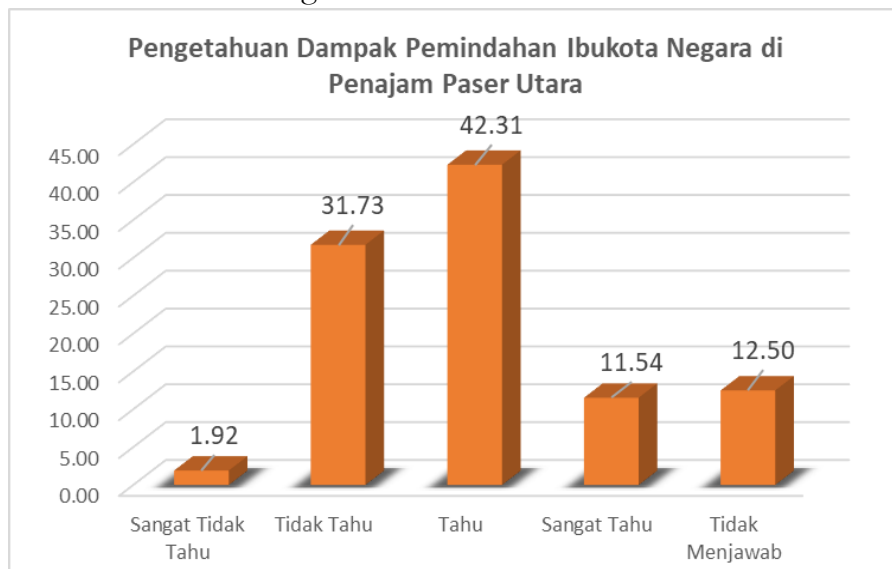
3. Pengetahuan Dampak Pemindahan Ibukota Negara di Penajam Paser Utara

Tabel 10. Persentase pengetahuan responden tentang dampak pemindahan ibukota negara di Penajam Paser Utara

Indeks Pengukuran	Frekuensi	Persent
Sangat Tidak Tahu	2	1.92
Tidak Tahu	33	31.73
Tahu	44	42.31
Sangat Tahu	12	11.54
Tidak Menjawab	13	12.50

Berdasarkan Tabel 10 diatas, persentase pengetahuan dampak pemerintah memindahkan ibukota negara di Penajam Utara, sangat tidak tahu sebesar 1,92%, tidak tahu sebesar 31,73%, tahu sebesar 42,31%, sangat tahu sebesar 11,54%, dan tidak menjawab sebesar 12,50%. Artinya persentase responden mengatakan tahu lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Dengan kata lain, secara umum masyarakat di Penajam Paser Utara mengetahui tentang dampak pemindahan ibukota Negara terhadap kesejahteraan masyarakat. Dimana pemindahan ibukota ke Penajam Paser Utara akan meningkatkan pemerataan di Kalimantan, baik dari sektor pembangunan, teknologi dan pendapatan masyarakat.

Berikut tampilan grafik pengetahuan masyarakat tentang dampak pemindahan ibukota Negara:



Gambar 9. Grafik Persentase pengetahuan responden tentang dampak pemindahan ibukota negara di Penajam Paser Utara

c) Menilai atau Evaluasi

Menilai atau mengevaluasi rencana pemindahan ibukota negara dilihat dari tingkat persetujuan masyarakat, tingkat penilaian positif dan negatif masyarakat terhadap rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara.

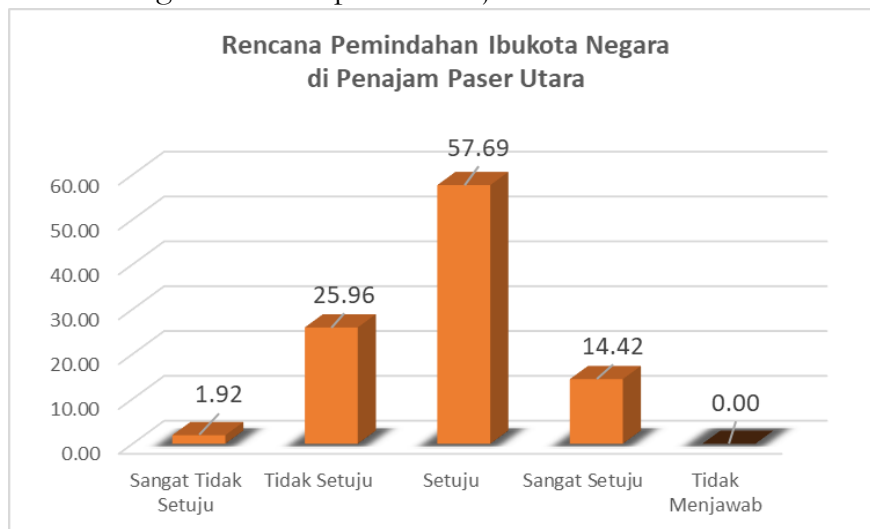
1. Rencana Pemindahan Ibukota Negara di Penajam Paser Utara

Tabel 11. Persentase penilaian responden tentang rencana pemindahan ibukota Negara di Penajam Paser Utara

Indeks Pengukuran	Frekuensi	Persent
Sangat Tidak Setuju	2	1.92
Tidak Setuju	27	25.96
Setuju	60	57.69
Sangat Setuju	15	14.42
Tidak Menjawab	0	0.00

Berdasarkan Tabel 11 diatas, persentase rencana pemindahan ibukota negara di Penajam Utara, sangat tidak setuju sebesar 1,92%, tidak setuju sebesar 25,96%, setuju sebesar 57,69%, sangat setuju sebesar 14,42%, dan tidak menjawab sebesar 0,00%. Artinya persentase responden mengatakan setuju lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Dengan kata lain, secara umum masyarakat di Penajam Paser Utara menyetujui tentang rencana pemindahan ibukota negara di Penajam Paser Utara. Karena pemindahan ibukota Negara ke Penajam Paser Utara memberi kontribusi terhadap pembangunan di berbagai sektor sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut tampilan grafik tentang penilaian masyarakat terkait pemindahan ibukota Negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara:



Gambar 10. Grafik persentase penilaian responden tentang rencana pemindahan ibukota Negara di Penajam Paser Utara

2. Pemindahan Ibukota Negara Bernilai Positif

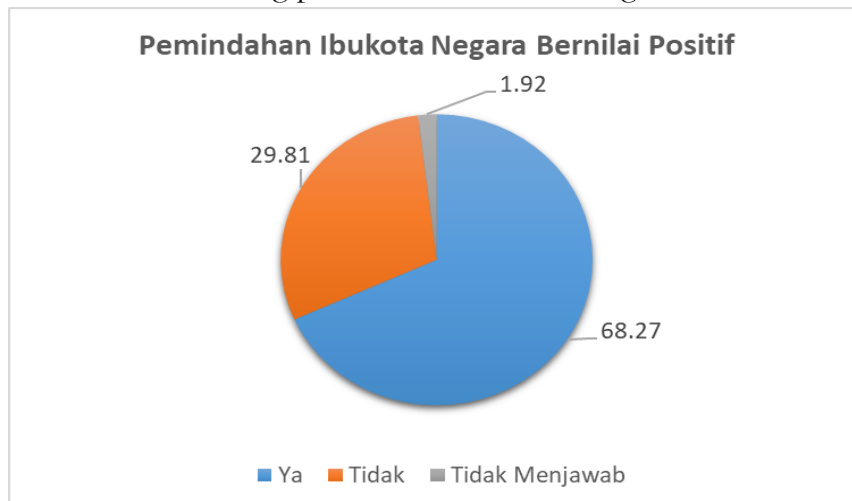
Tabel 12. Persentase penilaian responden tentang pemindahan ibukota Negara bernilai positif

Indeks Pengukuran	Frekuensi	Persent
Ya	71	68.27

Tidak	31	29.81
Tidak Menjawab	2	1.92

Berdasarkan Tabel 12 di atas, persentase pemindahan ibukota negara bernilai, ya sebesar 68,27%, tidak sebesar 29,81%, dan tidak menjawab sebesar 1,92%. Artinya persentase responden mengatakan ya lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Dengan kata lain, secara umum masyarakat di Penajam Paser Utara menilai pemindahan ibukota negara di Penajam Utara adalah positif. Artinya masyarakat menilai bahwa pemindahan ibukota ke Penajam Paser Utara akan meningkatkan kesejahteraan setara dengan Jawa. Dwi dalam Astriana (2012) mengemukakan bahwa dari segi ekonomi, para ahli melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya beli (*purchasing of power*) masyarakat. Yang berarti pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi didefinisikan sejahtera dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan

Berikut tampilan grafik penilaian masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara tentang pemindahan ibukota Negara:



Gambar 11. Grafik persentase penilaian responden tentang pemindahan ibukota Negara bernilai positif

3. Pemindahan Ibukota Negara Bernilai Negatif

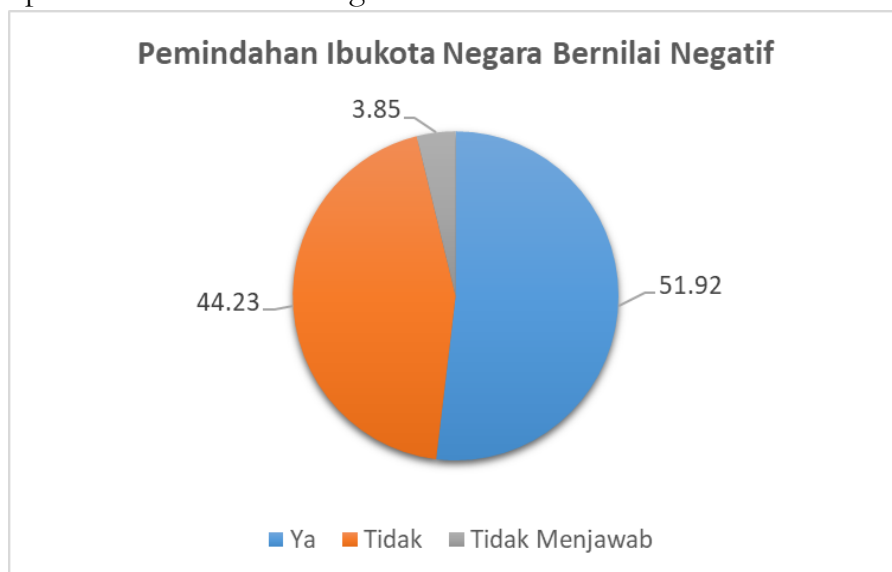
Tabel 13. Persentase penilaian responden tentang pemindahan ibukota Negara bernilai negatif

Pengetahuan	Frekuensi	Persent
Ya	54	51.92
Tidak	46	44.23
Tidak Menjawab	4	3.85

Berdasarkan Tabel 13 di atas, persentase pemindahan ibukota negara bernilai, “ya” sebesar 51,92%, “tidak” sebesar 44,23%, dan “tidak menjawab” sebesar 3,85%. Data menunjukkan bahwa hampir separuh responden dalam hal ini masyarakat penajam paser utara tidak setuju terhadap pemindahan ibu

kota negara Indonesia. Meskipun lebih dari separuh responden justru menyatakan setuju terhadap kebijakan pemerintah terkait pemindahan Ibukota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan pemerintah terkadang bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, sebab pada dasarnya persepsi masyarakat merupakan sebuah proses yang melibatkan kognisi (pengetahuan), afeksi (sikap) dan konasi (penilaian) masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap hal-hal atau objek tertentu yang diperoleh melalui panca indera yang dimiliki, sehingga terbentuklah gambaran mengenai objek atau subjek yang dipersepsikan. Perbedaan persepsi masyarakat ini menunjukkan polemik pro kontra terhadap kebijakan pemindahan ibukota negara Indonesia, pilihan setuju maupun tidak setuju didasarkan pada alasan-alasan logis masyarakat Penajam Paser Utara dengan pertimbangan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang akan dihadapi nantinya. Oleh karena itu, mengkomunikasikan suatu kebijakan pemerintah kepada publik secara jelas dan menyeluruh merupakan tahapan dari proses implementasi suatu kebijakan

Berikut tampilan grafik persentase penilaian negatif responden tentang pemindahan ibukota Negara:



Gambar 12. Grafik persentase penilaian responden tentang pemindahan ibukota Negara bernilai negatif

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan gambaran umum terkait persepsi masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur selaku masyarakat yang terdampak secara langsung terhadap rencana pemindahan ibukota negara Indonesia. Data penelitian telah menunjukkan bahwa 67,31% dari total responden telah mengetahui dan memahami rencana pemindahan ibukota ke Penajam Paser Utara dari berbagai media terutama media Televisi yang lebih banyak mengulas isu

pemindahan ibukota beserta alasannya sehingga mayoritas responden menilai positif atau setuju terhadap rencana kebijakan pemerintah terkait pemindahan ibukota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan timur tepatnya di kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini menunjukkan simpulan akhir dari penelitian terkait persepsi masyarakat terhadap pemindahan ibukota negara bernilai positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ferry R.P.P.S. (2014). *Media Televisi: Kajian Peran Media Massa dan Pengaruhnya Bagi Remaja*. Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 14 Nomor 1.
- Gian Anmara, Candra. (2019, 26 Agustus). *Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Ini Pernyataan Lengkap Jokowi*. CNBC Indonesia. Dikutip dari <http://www.cnbcindonesia.com>
- Liputan 6 SCTV. (2019). *Jumpa Pers Presiden Joko Widodo*. Istana Kepresidenan Tanggal 26 Agustus 2019.
- Maksudi, Beddy Iriawan, *Sistem Politik Indonesia (Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Perencanaan Pembangunan Nasional & Bappenas. (2019). *Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara Outline 1 . Mengapa Ibu Kota harus pindah ke Luar Jawa*.
- Prasilika, Tiara. 2007. *Studi Persepsi Resiko Keselamatan Berkendara Serta Hubungan Dengan Locus Of Control Pada Mahasiswa FKM UI Yang Mengendarai Motor 2007*. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Depok
- Silvana R, Tine & Rohanda, R. (2017). *Efektifitas Penggunaan Media Komunikasi dalam Rangka Sosialisasi Program GPMB (Gerakan Pembinaan Masyarakat Baca) di Jawa Barat*. Jurnal Komunikasi dan Media Vol. 2 Nomor 1 Agustus 2017.
- Toun, Nicodemus R. (2018). *Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya*. Jurnal Academia Praja Volume 1 Nomor 1 Februari 2018.
- Walgito, Bimo. 2000. *Pengantar Psikologi Umum., Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Widyastuti, Astriana. (2012). *Analisis Hubungan antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009*. Economics Development Analysis Journal, EDAJ 1 (2) 2012.